



REAKTIVASI WEBSITE DESA MELALUI PENGUATAN TATA KELOLA KONTEN INFORMASI DI DESA JATIADI

Mutimmah Rusniawati¹ *, Dinar Ayu Prameswari², Dela Dwi Rahmawati³, Geby Januar Ilham⁴

¹Universitas Panca Marga, Probolinggo, Indonesia

*E-mail: mutimmah@upm.ac.id

ABSTRAK

Ketersediaan website desa belum selalu diikuti oleh keberlanjutan pengelolaan informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut ditemukan di Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, yang telah memiliki website resmi desa, tetapi aktivitas pembaruan berita dan informasi masih terbatas karena pengelolaan konten belum menjadi proses kerja yang berlangsung secara konsisten. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mereaktivasi website Desa Jatiadi melalui penguatan tata kelola konten informasi dengan menempatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata sebagai fasilitator produksi dan publikasi konten. Pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan identifikasi kondisi awal, pemetaan sumber informasi, produksi dan kurasi konten, verifikasi, publikasi, serta evaluasi. Unit observasi berupa seluruh berita yang tersedia pada website pada kondisi awal dan selama periode pendampingan. Data diperoleh melalui observasi website, dokumentasi, koordinasi dengan pemerintah desa, dan pencatatan aktivitas publikasi. Hasil menunjukkan bahwa jumlah berita meningkat dari 2 berita sebelum pendampingan menjadi 13 berita selama periode intervensi, atau bertambah 11 berita dengan peningkatan relatif sebesar 550 persen. Konten yang dipublikasikan juga menunjukkan keragaman tema, meliputi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, kegiatan desa, program pembangunan dan ketahanan pangan, kunjungan serta pemberdayaan UMKM, dan program kerja KKN. Temuan tersebut menunjukkan bahwa reaktivasi website tidak semata-mata berupa aktivitas teknis pengunggahan berita, tetapi merupakan proses penguatan tata kelola konten yang memperluas representasi aktivitas desa dalam ruang digital. Program juga menghasilkan pola kerja kolaboratif yang menempatkan pemerintah desa sebagai pemegang otoritas informasi dan mahasiswa sebagai fasilitator produksi konten. Pendekatan ini dapat menjadi strategi praktis bagi desa yang telah memiliki infrastruktur digital tetapi menghadapi keterbatasan kontinuitas pengelolaan informasi.

Kata kunci: website desa; tata kelola konten; informasi digital; digitalisasi desa; pengabdian masyarakat

VILLAGE WEBSITE REACTIVATION THROUGH STRENGTHENING INFORMATION CONTENT GOVERNANCE IN JATIADI VILLAGE

ABSTRACT

The availability of a village website does not necessarily ensure the continuity of public information management. This condition was identified in Jatiadi Village, Gending District, Probolinggo Regency, which already had an official village website but maintained limited news and information updates because content management had not yet become a consistent organizational practice. This community engagement program aimed to reactivate the Jatiadi Village website through strengthened information content governance by positioning university students as facilitators of content production and publication. The program employed a participatory approach consisting of initial assessment, information-source mapping, content production and curation, verification, publication, and evaluation. The observation unit comprised all news items available on the website at baseline and during the intervention period. Data were collected through website observation, documentation, coordination with village officials, and publication activity records. The results show that the number of news items increased from 2 before the intervention to 13 during the intervention period, representing an addition of 11 news items and a relative increase of 550 percent. The published content also became more diverse, covering religious and community activities, village activities, development and food-security programs, visits and empowerment of local small businesses, and university community-engagement activities. These findings indicate that website reactivation is not merely a technical activity of uploading news but a process of strengthening content governance that expands the representation of village activities in the digital space. The program also established a collaborative workflow in which the village government retained information authority while students facilitated content production. This approach provides a practical strategy for villages that already possess digital infrastructure but face limitations in maintaining continuous information management.

Keywords: village website; content governance; digital information; village digitalization; community engagement



PENDAHULUAN

Transformasi digital pemerintahan telah mengubah cara institusi publik mengelola informasi, membangun komunikasi dengan masyarakat, dan menyediakan layanan yang semakin mudah diakses. Pada tingkat pemerintahan desa, transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga dengan kemampuan institusi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik tata kelola sehari-hari. Sihotang, *et al* (2025) mengatakan digitalisasi pemerintahan desa karena itu perlu dipahami sebagai proses kelembagaan yang melibatkan teknologi, aktor, pola kerja, dan mekanisme pengelolaan informasi secara berkelanjutan. Perspektif digital *government* menempatkan teknologi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen yang dapat mendukung inovasi, transparansi, ko-produksi, dan penciptaan nilai publik (Gil-Garcia *et al.*, 2018).

Sari, *et al* (2026) berpendapat website desa merupakan salah satu bentuk infrastruktur digital yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi pemerintahan, mendokumentasikan kegiatan, memperkenalkan potensi wilayah, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Website desa dibuat bukan hanya sebagai halaman informasi biasa, tetapi sebagai media digital untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, dan penyebaran informasi pemerintahan desa kepada masyarakat (Firdaus *et al.*, 2022). Dalam konteks pemerintahan desa, website memiliki posisi strategis karena dapat menjadi kanal resmi yang mempertemukan informasi pemerintahan dengan aktivitas sosial masyarakat. Namun, ketersediaan platform tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa transformasi digital telah berjalan secara optimal. Mergel *et al.* (2019) menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan merupakan perubahan yang bersifat organisasional dan tidak berhenti pada penyediaan layanan atau produk digital. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

Persoalan yang muncul dalam praktik sering bergeser dari ketersediaan platform menuju kontinuitas pengelolaan konten. Analisis terhadap website desa di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan adanya disparitas dalam intensitas, keragaman, dan relevansi konten yang dipublikasikan antardesa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan digital pemerintahan desa dipengaruhi bukan hanya oleh infrastruktur, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan strategi komunikasi digital (Sumirah *et al.*, 2025). Kajian mengenai transparansi melalui website desa juga menunjukkan bahwa platform yang telah tersedia belum selalu dikelola secara optimal karena informasi yang dipublikasikan masih terbatas (Puspitasari *et al.*, 2023).

Pada sisi pengabdian kepada masyarakat, persoalan pengelolaan konten telah menjadi perhatian dalam sejumlah kegiatan. Pendampingan penulisan artikel website di Desa Mojomalang dilakukan karena keterbatasan konten berita menyebabkan website belum berfungsi optimal sebagai media publikasi (Widhiandono *et al.*, 2021). Di Desa Baros, perhatian setelah tersedianya website juga diarahkan pada kemampuan menghasilkan konten yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat (Samodro *et al.*, 2024). Sementara itu, pelatihan pengelolaan website di Desa Bandung menunjukkan bahwa keterampilan pengelola menjadi faktor penting dalam pemanfaatan website sebagai media informasi (Nuraisiah *et al.*, 2024). Studi lain mengenai Desa Klepu dan Damarwulan juga memperlihatkan bahwa website yang telah tersedia dapat tetap kurang optimal ketika pengelolaannya belum dilakukan secara profesional dan berkelanjutan (Solihin *et al.*, 2025).

Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, telah memiliki website resmi desa yang dapat digunakan sebagai kanal informasi digital. Berdasarkan identifikasi awal bersama pemerintah desa, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan website, melainkan pada terbatasnya kontinuitas pembaruan berita dan informasi. Sebelum program pendampingan, website hanya memuat 2 berita. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara aktivitas nyata desa dan representasinya pada kanal digital resmi. Pemerintah desa memiliki berbagai tanggung jawab administratif dan pelayanan sehingga produksi, penyuntingan, serta publikasi berita belum dapat dilakukan secara konsisten.

Permasalahan tersebut penting ditempatkan sebagai isu tata kelola informasi, bukan semata-mata persoalan teknis pengunggahan berita. Website yang tidak diperbarui secara berkala berisiko menjadi platform yang tersedia secara teknis tetapi tidak sepenuhnya menjalankan fungsi komunikasinya. Sebaliknya, produksi konten yang teratur dapat memperluas ketersediaan informasi dan meningkatkan fungsi website sebagai media komunikasi publik. Rofi'ah *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa website desa dapat menjadi sarana layanan informasi secara daring, tetapi



pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pengelolaan informasi. Dengan demikian, penguatan konten menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa aset digital yang telah dimiliki desa benar-benar digunakan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008).

Program KKN Jatiadi 26 Universitas Panca Marga diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendampingan produksi dan publikasi konten, tanpa melakukan redesign maupun pengembangan sistem baru. Mahasiswa membantu mendokumentasikan kegiatan, mengidentifikasi informasi yang layak dipublikasikan, menyusun berita, memilih dokumentasi visual, melakukan koordinasi verifikasi, dan mengunggah informasi pada kanal website yang telah tersedia. Pemerintah desa tetap menjadi pemegang otoritas terhadap informasi resmi, sedangkan mahasiswa berperan sebagai fasilitator produksi konten. Pola tersebut menempatkan kegiatan KKN sebagai mekanisme penguatan kapasitas dan pembagian kerja, bukan sebagai pengambilalihan pengelolaan website.

Karakter tersebut menjadi pembeda kegiatan ini dari sejumlah program pengabdian yang berorientasi pada pembuatan atau pengembangan website baru. Buntoro *et al.*, (2024), misalnya, melaporkan pemanfaatan website desa sebagai bagian dari upaya pelayanan publik pada desa yang belum memiliki website resmi. Sebaliknya, kasus Jatiadi berangkat dari kondisi yang berbeda: platform telah tersedia, tetapi aktivitas publikasi sangat terbatas. Karena itu, fokus kegiatan diarahkan pada reaktivasi website melalui penguatan tata kelola konten. Kontribusi pengabdian tidak diletakkan pada penciptaan teknologi baru, melainkan pada optimalisasi infrastruktur digital yang telah tersedia melalui mekanisme produksi informasi yang lebih terstruktur.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah mereaktivasi website Desa Jatiadi melalui penguatan tata kelola konten informasi. Secara khusus, kegiatan diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi awal aktivitas publikasi, meningkatkan produksi dan keragaman konten, membangun alur dokumentasi–penulisan–verifikasi–publikasi, serta memperkuat peluang keberlanjutan pengelolaan informasi oleh pemerintah desa. Kebaruan kegiatan terletak pada pendekatan reaktivasi terhadap website yang telah tersedia dengan menjadikan tata kelola konten dan kolaborasi pemerintah desa–mahasiswa sebagai inti intervensi.

METODE

A. Desain Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, melalui program KKN Jatiadi 26 Universitas Panca Marga pada Agustus 2026. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan menempatkan pemerintah desa sebagai mitra utama dan mahasiswa sebagai fasilitator pendampingan. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi berkaitan dengan pembagian peran, ketersediaan bahan informasi, mekanisme verifikasi, dan kontinuitas produksi konten. Intervensi dilakukan tanpa redesign website atau pengembangan sistem baru; seluruh kegiatan difokuskan pada aktivasi kembali kanal informasi melalui publikasi berita dan informasi aktual pada platform yang telah dimiliki desa.

B. Subjek, Unit Observasi, dan Sumber Data

Mitra pengabdian adalah Pemerintah Desa Jatiadi, sedangkan pelaksana pendampingan adalah mahasiswa KKN Jatiadi 26 Universitas Panca Marga yang ditugaskan dalam dokumentasi dan pengelolaan konten. Unit observasi kuantitatif adalah seluruh berita yang tersedia pada website Desa Jatiadi pada saat asesmen awal dan seluruh berita yang dipublikasikan selama periode intervensi hingga 29 Agustus 2026. Karena jumlah objek dapat diamati secara keseluruhan, teknik yang digunakan adalah *total enumeration* terhadap konten berita, bukan pengambilan sampel statistik. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi kondisi website, koordinasi dengan pemerintah desa, dokumentasi kegiatan, serta catatan proses produksi dan publikasi.

C. Instrumen dan Tahapan Pelaksanaan

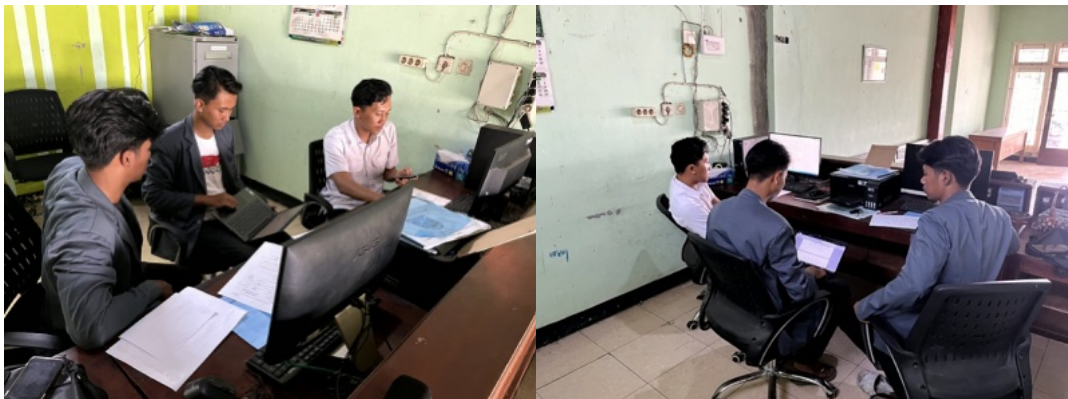
Instrumen pengabdian berupa observasi website, format pencatatan konten, dokumentasi visual, dan pedoman koordinasi dengan pemerintah desa. Observasi diarahkan pada empat aspek, yaitu keterbaruan informasi, jumlah publikasi, keragaman tema, dan mekanisme pengelolaan konten. Pelaksanaan terdiri atas lima tahap: (1) identifikasi kondisi awal website; (2) pemetaan kegiatan dan sumber informasi; (3) produksi dan kurasi konten; (4) verifikasi dan publikasi; serta (5) evaluasi

aktivitas publikasi dan penguatan mekanisme keberlanjutan. Pada tahap produksi, mahasiswa mengumpulkan informasi dan dokumentasi kegiatan, menyusun naskah berita, memilih foto, serta melakukan penyuntingan. Konten kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah desa sebelum dipublikasikan.



Gambar 1. Tahapan pendampingan diskusi kebutuhan pengelolaan informasi di Posko KKN.

Sumber: dokumentasi pribadi mahasiswa KKN, 9 Agustus 2026.



Gambar 2. Tahapan proses pengerjaan konten dan koordinasi sebelum konten dipublikasikan bersama staff pemerintah desa di Kantor Desa Jatiadi

Sumber: dokumentasi pribadi mahasiswa KKN, 18 Agustus 2026.

D. Teknik Analisis Data

Data jumlah berita dianalisis secara deskriptif melalui perbandingan kondisi awal dan kondisi selama intervensi. Perubahan aktivitas publikasi dihitung berdasarkan selisih jumlah berita dan persentase peningkatan dari baseline. Data mengenai tema berita dianalisis dengan pengelompokan kategori berdasarkan substansi informasi yang dipublikasikan. Data proses pengelolaan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi perubahan alur kerja, pembagian peran, dan peluang keberlanjutan. Interpretasi hasil dibatasi pada perubahan aktivitas publikasi dan penguatan tata kelola konten; kegiatan tidak menggunakan data pengguna website sehingga tidak digunakan untuk menyimpulkan peningkatan partisipasi, kepercayaan, atau kepuasan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Awal: Website Tersedia, tetapi Aktivitas Publikasi Terbatas

Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa Desa Jatiadi telah memiliki website resmi sebagai infrastruktur komunikasi digital. Temuan penting justru berada pada tingkat pemanfaatan: sebelum pendampingan, website hanya memuat 2 berita. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan platform belum secara otomatis menghasilkan kontinuitas informasi. Di sisi lain, aktivitas desa selama periode KKN berlangsung dalam berbagai bidang, sehingga terdapat sumber informasi yang sebenarnya cukup besar tetapi belum seluruhnya terdokumentasi melalui kanal digital resmi.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *technology availability* dan *technology utilization*. Digitalisasi desa bukan hanya tentang menyediakan teknologi, tetapi bagaimana



pemerintah desa mampu menggunakan dan mengelola teknologi tersebut secara efektif. Website desa yang sudah tersedia harus diikuti dengan kemampuan pengelolaan, pembaruan informasi, dan pemanfaatan oleh masyarakat agar memberikan manfaat nyata (Ashar *et al.*, 2025). Website telah tersedia, tetapi nilai komunikasinya bergantung pada kemampuan organisasi menghasilkan, memverifikasi, dan memperbarui konten. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sumirah *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa intensitas, variasi, dan relevansi konten merupakan aspek penting dalam membaca kesiapan digital pemerintahan desa. Penelitian Puspitasari *et al.* (2023) juga menunjukkan bahwa website desa belum selalu dikelola secara optimal meskipun platform telah tersedia. Dengan demikian, baseline dua berita dalam kegiatan ini tidak diposisikan sebagai ukuran kualitas website secara keseluruhan, melainkan sebagai indikator sederhana aktivitas publikasi pada awal intervensi.

Tabel 1. Perubahan Aktivitas Publikasi Berita Website Desa Jatiadi

Kondisi	Jumlah Berita	Penambahan	Keterangan
Sebelum pendampingan	2	–	Baseline
Selama pendampingan hingga 29 Agustus 2026	13	+11	Kondisi setelah intervensi
Perubahan relatif	–	+550%	Dihitung dari baseline 2 berita
Rasio akhir terhadap baseline	–	6,5 kali	13 dibandingkan 2 berita

Catatan: Persentase peningkatan dihitung dari $((13-2)/2) \times 100$.

Secara kuantitatif, jumlah berita meningkat dari 2 menjadi 13, sehingga terdapat tambahan 11 berita. Jika baseline digunakan sebagai pembanding, peningkatan relatif mencapai 550 persen dan jumlah berita pada akhir periode observasi menjadi 6,5 kali kondisi awal. Angka tersebut menunjukkan perubahan yang jelas pada intensitas publikasi, tetapi interpretasinya tetap dibatasi pada aktivitas konten. Perubahan tersebut tidak digunakan untuk mengklaim bahwa seluruh fungsi website meningkat sebesar 550 persen, karena tidak terdapat pengukuran terhadap kualitas teknis website, jumlah pengunjung, interaksi pengguna, maupun kepuasan masyarakat.

B. Keragaman Konten Memperluas Representasi Aktivitas Desa

Perubahan tidak hanya terlihat pada jumlah berita, tetapi juga pada keragaman tema informasi yang dipublikasikan. Website desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat menampilkan informasi dasar desa, tetapi menjadi representasi digital desa yang menggambarkan berbagai kegiatan dan potensi yang ada di dalamnya (Mujiani *et al.*, 2026). Konten selama periode pendampingan mencakup kegiatan tasyakuran desa, peringatan Maulid Nabi, kegiatan karnaval, program kerja KKN, kegiatan penanaman dan optimalisasi lahan kantor desa untuk ketahanan pangan, serta kunjungan dan pengenalan UMKM. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa proses reaktivasi membuka ruang yang lebih luas bagi aktivitas pemerintahan, sosial, ekonomi, dan pengabdian untuk direpresentasikan melalui kanal digital desa.

Tabel 2. Kategori Konten Berita yang Dipublikasikan Selama Pendampingan

Kategori	Contoh Konten	Fungsi Informasi
Keagamaan dan kemasyarakatan	Maulid Nabi; tasyakuran desa	Dokumentasi dan informasi kegiatan masyarakat
Kegiatan desa	Kegiatan dan agenda desa	Komunikasi informasi publik
Pembangunan dan ketahanan pangan	Optimalisasi lahan kantor desa; penanaman bibit	Dokumentasi program dan pemberdayaan
Pemberdayaan ekonomi	Kunjungan dan pengenalan UMKM	Dokumentasi potensi ekonomi lokal
Program KKN	Program kerja mahasiswa di Desa Jatiadi	Dokumentasi kolaborasi desa–perguruan tinggi

Salah satu contoh yang terdokumentasi pada website adalah berita mengenai pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus tasyakuran HUT RI ke-81 di Dusun Rowojati Tengah dan wilayah sekitarnya. Contoh lain adalah berita mengenai optimalisasi lahan Kantor Desa Jatiadi untuk ketahanan pangan bersama mahasiswa KKN Universitas Panca Marga. Konten tersebut memperlihatkan bahwa website tidak hanya menjadi ruang publikasi aktivitas

administratif, tetapi juga menjadi arsip digital yang merepresentasikan kegiatan sosial dan program pembangunan desa.



Gambar 3. Contoh tampilan konten berita hasil reaktivasi website Desa Jatiadi.

Sumber: dokumentasi website Desa Jatiadi, 29 Agustus 2026.

Keragaman tersebut penting karena pemanfaatan website desa tidak cukup dinilai dari keberadaan platform atau jumlah unggahan semata. Analisis Sumirah et al. (2025) menunjukkan bahwa intensitas dan variasi konten merupakan bagian dari karakter pemanfaatan digital pemerintah desa. Pada sisi lain, Rofi'ah et al. (2023) menunjukkan bahwa website dapat menjadi kanal layanan informasi, tetapi keterbatasan informasi yang tersedia masih menjadi persoalan. Dengan demikian, perubahan Jatiadi dari 2 menjadi 13 berita dapat dibaca dalam dua dimensi sekaligus: peningkatan intensitas publikasi dan perluasan representasi kegiatan desa.

C. Reaktivasi sebagai Penguatan Tata Kelola Konten

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa inti intervensi bukan terletak pada kemampuan teknis mengunggah berita, tetapi pada terbentuknya proses tata kelola konten. Mahasiswa membantu menghubungkan kegiatan lapangan dengan kanal informasi resmi melalui alur dokumentasi, penyusunan berita, kurasi, verifikasi, dan publikasi. Alur tersebut dapat dirumuskan sebagai: aktivitas desa → dokumentasi → penyusunan konten → verifikasi pemerintah desa → publikasi → arsip digital.

Pembagian peran tersebut penting untuk menjaga legitimasi informasi. Mahasiswa tidak ditempatkan sebagai pengambil keputusan atas isi informasi resmi, tetapi sebagai fasilitator produksi. Pemerintah desa tetap menjadi sumber dan pihak yang memverifikasi informasi sebelum publikasi. Model ini memperlihatkan bahwa keterbatasan kapasitas dapat direspons melalui distribusi fungsi kerja tanpa memindahkan kewenangan institusional. Temuan tersebut sejalan dengan literatur pengabdian yang menunjukkan pentingnya pendampingan penulisan dan pengelolaan konten setelah website tersedia (Samodro et al., 2024; Widhiandono et al., 2021).

Tabel 3. Alur Pengelolaan Konten yang Diperkuat

Tahap	Pelaksana Utama	Aktivitas	Output
Identifikasi	Mahasiswa + pemerintah desa	Mengidentifikasi kegiatan dan kebutuhan informasi	Daftar bahan informasi
Dokumentasi	Mahasiswa	Mengumpulkan foto dan informasi kegiatan	Bahan visual dan data
Produksi	Mahasiswa	Menyusun dan menyunting naskah	Draft berita

Tahap	Pelaksana Utama	Aktivitas	Output
Verifikasi	Pemerintah desa	Memeriksa substansi informasi	Konten terverifikasi
Publikasi	Tim pengelola	Mengunggah konten ke website	Berita terpublikasi
Arsip dan evaluasi	Pemerintah desa + tim	Menyimpan dokumentasi dan meninjau publikasi	Jejak digital dan evaluasi

Perubahan tersebut memperlihatkan pergeseran dari pola pengelolaan yang bergantung pada waktu ruang aparatur menuju pola kerja kolaboratif yang lebih terstruktur. Hal ini relevan dengan konsep transformasi digital pemerintahan yang menempatkan perubahan proses organisasi sebagai bagian penting dari transformasi, bukan hanya penyediaan teknologi (Mergel et al., 2019). Dalam kasus Jatiadi, website tidak berubah secara teknis; yang berubah adalah intensitas pemanfaatan dan mekanisme produksi informasi di sekitarnya. Karena itu, istilah reaktivasi lebih tepat daripada pembangunan website.

D. Model Reaktivasi dan Implikasi Keberlanjutan

Berdasarkan rangkaian kegiatan dan hasil yang diperoleh, reaktivasi website Desa Jatiadi dapat dipahami melalui model yang terdiri atas tujuh tahapan. Model dimulai dari kondisi website yang telah tersedia tetapi memiliki aktivitas publikasi terbatas, kemudian bergerak melalui identifikasi kesenjangan informasi, pemetaan dan produksi konten, verifikasi, publikasi, peningkatan aktivitas dan keragaman informasi, hingga penguatan tata kelola dan keberlanjutan.

MODEL REAKTIVASI WEBSITE DESA JATIADI



Gambar 4. Model reaktivasi website Desa Jatiadi melalui penguatan tata kelola konten.

Model tersebut menempatkan peningkatan jumlah berita sebagai salah satu output awal, bukan sebagai tujuan akhir. Tujuan yang lebih strategis adalah menjadikan produksi informasi sebagai bagian dari rutinitas pengelolaan website. Keberlanjutan karena itu membutuhkan pembagian tugas sederhana, format penulisan yang konsisten, penyimpanan dokumentasi, mekanisme verifikasi, dan evaluasi berkala. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Solihin et al. (2025) bahwa website desa yang telah tersedia tetap membutuhkan pengelolaan dan penulisan berita yang baik agar fungsi informasinya tidak berhenti pada keberadaan platform.

Kontribusi kegiatan juga perlu diposisikan secara proporsional. Peningkatan jumlah berita dari 2 menjadi 13 merupakan bukti langsung adanya peningkatan aktivitas publikasi selama periode



pendampingan. Namun, data tersebut belum memungkinkan penarikan kesimpulan mengenai peningkatan jumlah pengunjung, keterlibatan warga, kepuasan masyarakat, atau transparansi substantif. Pembatasan klaim tersebut penting karena penelitian mengenai transparansi website desa menunjukkan bahwa ketersediaan dan publikasi informasi merupakan prasyarat, tetapi tidak otomatis membuktikan seluruh dimensi transparansi telah terpenuhi (Puspitasari et al., 2023). Dengan demikian, capaian paling kuat dari program ini adalah reaktivasi kanal informasi dan penguatan proses produksi konten.

Tabel 4. Indikator Capaian dan Bukti Hasil Pengabdian

Indikator	Kondisi Awal	Hasil Pendampingan
Aktivitas publikasi berita	2 berita	13 berita
Penambahan berita	–	11 berita
Peningkatan relatif	–	550%
Keragaman tema	Terbatas	Keagamaan, kemasyarakatan, desa, pembangunan/ketahanan pangan, UMKM, dan KKN
Mekanisme produksi konten	Belum terstruktur secara konsisten	Dokumentasi–produksi–verifikasi–publikasi
Fungsi mahasiswa	–	Fasilitator produksi dan dokumentasi konten

Dengan demikian, reaktivasi website Desa Jatiadi menawarkan bentuk intervensi yang relatif sederhana tetapi relevan bagi desa yang telah memiliki infrastruktur digital. Alih-alih membangun sistem baru, sumber daya diarahkan untuk mengatasi bottleneck pada produksi informasi. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan peran KKN yang lebih strategis, yaitu sebagai penghubung sementara antara aktivitas lapangan dan kebutuhan komunikasi digital pemerintah desa. Nilai program terletak pada kemampuan mengubah kegiatan yang sebelumnya hanya berlangsung secara luring menjadi informasi yang terdokumentasi dan dapat diakses melalui kanal digital resmi.

SIMPULAN

Reaktivasi website Desa Jatiadi menunjukkan bahwa persoalan digitalisasi desa tidak selalu terletak pada ketiadaan infrastruktur, tetapi dapat muncul pada keterbatasan kontinuitas produksi dan pengelolaan informasi. Website yang telah tersedia membutuhkan mekanisme yang menghubungkan aktivitas desa dengan proses dokumentasi, penulisan, verifikasi, dan publikasi agar berfungsi secara konsisten sebagai kanal informasi publik. Pendampingan melalui KKN Jatiadi 26 berhasil meningkatkan jumlah berita dari 2 berita sebelum intervensi menjadi 13 berita selama periode pendampingan hingga 29 Agustus 2026, dengan penambahan 11 berita dan peningkatan relatif sebesar 550 persen. Perubahan tersebut disertai perluasan keragaman konten yang mencakup kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, kegiatan desa, pembangunan dan ketahanan pangan, UMKM, serta program kerja KKN. Kontribusi utama kegiatan bukan sekadar peningkatan jumlah unggahan, melainkan penguatan tata kelola konten melalui pembagian peran antara pemerintah desa sebagai pemegang otoritas informasi dan mahasiswa sebagai fasilitator produksi konten. Model reaktivasi yang dikembangkan menempatkan keberlanjutan sebagai tahap penting, sehingga mekanisme dokumentasi, verifikasi, publikasi, dan pengarsipan perlu dilanjutkan oleh pengelola internal desa setelah pendampingan berakhir. Untuk pengembangan berikutnya, evaluasi dapat diperluas pada data pengunjung website, keterlibatan pengguna, kualitas informasi, dan umpan balik masyarakat sehingga dampak kanal digital terhadap komunikasi publik desa dapat diukur secara lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, atas dukungan, keterbukaan informasi, dan kerja sama selama pelaksanaan program. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Panca Marga, Dosen Pembimbing Lapangan, serta seluruh mahasiswa KKN Jatiadi 26 yang berkontribusi dalam dokumentasi, produksi konten, koordinasi, pendampingan, dan publikasi informasi desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ashar, A., Irwan, I., & Dema, H. (2025). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan e-government di desa sipodeceng. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 421-428.
- Buntoro, G. A., Wirawanto, Y., Hantoro, I. B., Aji, L. P., Yonatama, I., Syarifuddin, I., Prayitno, R. A., & Prasetyo, Y. (2024). Pemanfaatan website desa dan layanan mandiri sebagai upaya pelayanan publik masyarakat Desa Tugu. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 7(1), 39–51. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v7i1.21020>
- Firdaus, I., Sembiring, S., Riyanto, A., Situmeang, R., & Karo, P. K. (2022). Pendampingan Pengelolaan Website Desa Hajimena sebagai Penunjang Program Digitalisasi Desa. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(10), 3387-3396.
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads. *Public Management Review*, 20(5), 633–646. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Mujiani, S., Jauhari, B., & Astuti, S. Y. (2026). Digitalisasi Ekonomi Kreatif Desa Wisata Melalui Pembuatan Website dan Media Sosial: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 17801-17811.
- Nuraisiah, R., Prihatin, K. S., & Haerani, A. (2024). Pelatihan penggunaan website desa bagi para staff di Desa Bandung, Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(1), 278–288. <https://doi.org/10.30653/jppm.v9i1.641>
- Puspitasari, M., Ardiyansyah, C., & Hapsari, A. N. S. (2023). Can a village website be an indicator of public transparency? *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2), 295–309. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i2.303>
- Rofi'ah, S. A., Kumalasari, A., & Lukita, C. (2023). E-transparency in providing information services through village websites. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 133–146. <https://doi.org/10.31314/pjia.12.1.133-146.2023>
- Samodro, D., Maryam, S., Satrio, J., & Nisa Zempi, C. (2024). Penulisan konten untuk website dan media sosial Desa Baros, Kabupaten Serang. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(2), 30–36. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3018>
- Sari, D. G., Farizal, T., Hadi, K., Nadeak, S. I., & Ardiansyah, A. (2026). Penerapan Website sebagai Inovasi Pelayanan Publik dan Promosi Potensi Lokal di Desa Ladang Baro. *Teknodimas: Teknologi Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
- Sihotang, D. M., Hidayanto, A. N., Suchyo, Y. G., & Wijoyono, E. (2025). *Sistem informasi desa: Dari ekosistem hingga strategi adopsi*. Penerbit Adab.
- Solihin, K., Fuaidi, I., Maulana, H. A., & Mardawan, Z. (2025). Pelatihan pengelolaan website Desa Klepu dan Damarwulan Keling Jepara menuju Smart Village. *Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.35878/kifah.v4i1.1360>
- Sumirah, S., Nugroho, B., Grahitandaru, A., Fikri, M., Suwandi, B., & Wibowo, A. (2025). Village website content analysis as an indicator of government digital readiness: An informetric study in West Lombok Regency. In 2025 International Conference on Smart-Green Technology in Electrical and Information Systems (pp. 53–58). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICSGTEIS68532.2025.11284490>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Widhiandono, D., Rizqi, M., Angelina, V., & Widyastuti, A. (2021). Pendampingan penulisan artikel website desa di Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Produktivitas Pasca Pandemi. Universitas Sebelas Maret.